

INTISARI

Penelitian yang berjudul “Praktik Demokrasi Permusyawaratan di Parlemen Indonesia: Sebuah Studi Filsafat Politik” dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa Indonesia telah memiliki konsep demokrasi deliberatif (permusyawaratan) yang berakar pada sila ke-empat Pancasila dengan tujuan membangun sistem politik berbasis pada konsensus (mufakat). Namun, dalam praktiknya, pengambilan keputusan di Parlemen Indonesia sering dipengaruhi oleh pragmatisme politik sesaat sehingga kebijakan publik yang dihasilkan seringkali menyimpang dari proses deliberasi yang seharusnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi nilai deliberatif (permusyawaratan) yang dijalankan di Parlemen Indonesia dan menganalisis implikasinya terhadap praktik politik aktual di Parlemen Indonesia.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang mengambil model penelitian filsafat tentang masalah aktual dengan objek material berupa praktik permusyawaratan di Parlemen Indonesia dan objek formal yang digunakan adalah filsafat politik. Analisis data dilakukan menggunakan beberapa unsur metodis, yaitu: deskripsi, interpretasi, induksi dan deduksi, kesinambungan historis, serta refleksi pribadi peneliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Demokrasi Permusyawaratan di Parlemen Indonesia memiliki nilai dasar yang mengutamakan musyawarah sebagai mekanisme utama dan pemungutan suara terbanyak (*voting*) sebagai mekanisme alternatif dalam pengambilan keputusan, tetapi secara praksis nilai tersebut telah mengalami distorsi dan reduksi sehingga telah mengikis makna permusyawaratan; (2) Implikasi dari nilai praksis tersebut berpengaruh terhadap kualitas kebijakan publik yang dihasilkan sehingga menimbulkan krisis legitimasi dan kontroversi serta berdampak terhadap kinerja politik yang dijalankan seperti performa secara individu dan kelembagaan.

Kata Kunci: Demokrasi Permusyawaratan, Parlemen, Politik, Indonesia

ABSTRACT

The research entitled “The Practice of Consultative Democracy in the Indonesian Parliament: A Study of Political Philosophy” is motivated by the fact that Indonesia already has the concept of deliberative democracy (permusyawaratan) which is rooted in the fourth principle of Pancasila with the aim of building a political system based on consensus (mufakat). However, in practice, decision-making in the Indonesian Parliament is often influenced by momentary political pragmatism so that the resulting public policies often deviate from the supposed deliberation process. This study aims to identify the deliberative values practiced in the Indonesian Parliament and analyze their implications for actual political practices in the Indonesian Parliament.

This type of research is a qualitative research that takes a philosophical research model on actual problems with the material object in the form of deliberative practices in the Indonesian Parliament and the formal object used is political philosophy. Data analysis is carried out using several methodical elements, namely: description, interpretation, induction and deduction, historical continuity, and personal reflection of the researcher.

The results showed that (1) Deliberative Democracy in the Indonesian Parliament has a basic value that prioritizes deliberation as the main mechanism and voting as an alternative mechanism in decision making, but in praxis this value has experienced distortion and reduction so that it has eroded the meaning of deliberation; (2) The implications of this praxis value affect the quality of public policies produced, causing a legitimacy crisis and controversy and having an impact on political performance such as individual and institutional performance.

Keywords: *Deliberative Democracy, Parliament, Politics, Indonesia*